



Pantai Taman-Pacitan ecotourism development: Conservation and community empowerment orientation

Wahyu Prihanta ^{a,1,*}, Ach. Muhib Zainuri ^{b,2}, Rahayu Hartini ^{c,3}, Amir Syarifuddin ^{d,4}, Tundung Subali Patma ^{e,5}

^a Department of Biology Education, Faculty of Teacher Training and Education, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

^b Department of Production Engineering and Maintenance, Politeknik Negeri Malang, Indonesia

^c Department of Law, Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

^d Department of Forestry, Faculty of Agriculture and Animal Husbandry, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

^e D-4 Electronics Engineering, Politeknik Negeri Malang, Indonesia

¹ wahyuprihanta@gmail.com; ² muhibzain@gmail.com; ³ hartini@umm.ac.id; ⁴ amir@umm.ac.id; ⁵ tundung2017@gmail.com

* Corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received: 14 February 2020

Revised: 19 March 2020

Accepted: 18 April 2020

Published: 30 April 2020

Keywords

Ecotourism

Community development

Pantai Taman

Sea turtle conservation

Sustainable development



ABSTRACT

Ecotourism is a form of tourism that is closely linked to the principle of conservation. Thus, ecotourism is right and beneficial in maintaining the integrity and authenticity of ecosystems in natural areas, particularly turtle conservation areas. Ecotourism is synergized to turtle conservation as it has such features: (1) Conservation, the use of biodiversity does not damage the natural source, also it does not cause negative impact whereas it is very environmentally friendly, (2) Education, by improving community's awareness and changing their behavior about the need for conservation of living natural resources and their conservation, (3) Economy, ecotourism provides economic benefits and spur regional development; and (4) Active role of community, this is done by building partnership with local communities for the development of ecotourism. Based on the issues, "IbW Conservation and Ecotourism Ngadirojo District Pacitan Region" was done by (1) Making a model of tourism activities that is environmentally, ecologically, socially, and economically beneficial to local communities and to the sustainability of natural resources, (2) Assessing the object of tourist attraction in flora and fauna conservation areas, in this case sea turtles and their ecosystems, so that can synergize with ecotourism activities, and (3) Making a model of local community-based tourist institution. The method implemented to achieve the objectives was "Community Empowerment through Ecotourism" which is described as follow: (1) Land Conservation, value and travel product, (2) Creation of an ecotourism atmosphere that all people who live in the area will gain the benefit, (3) The development of tourism activities that carry the excellence of the physical, economic, socio-cultural aspects of the local, (4) The solid image of ecotourism activities in the region that is supported by the readiness of all stakeholders, and (5) Integration of turtle theme conservation and ecotourism area with other supporting tourism products in the Regency. Pacitan Construction of facilities that have been carried out are: (1) developing the forest of eternity, (2) ecological restoration of coastal forests, (3) making sea water wells for turtle ponds, (4) nursery of coastal forest vegetation, (5) construction of marine biota ponds and sanitation facilities, (6) construction of shelters and gazebos, (7) construction of parking lot, and (8) widening of the ecotourism ring road. The next stage plans are: (1) ecotourism community empowerment, (2) strengthening the ecotourism area, and (3) revitalization of marine biota ponds.

Copyright © 2020, Prihanta et al
This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



How to cite: Prihanta, W., Zainuri, A. M., Hartini, R., Syarifuddin, A., & Patma, T. S. (2020). Pantai Taman-Pacitan ecotourism development: Conservation and community empowerment orientation. *Journal of Community Service and Empowerment*, 1(1), 1-16. doi: <https://doi.org/10.22219/jcse.v1i1.11515>

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dewasa ini pada hakikatnya menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat baik fisik maupun non fisik (Prihanta, Syarifuddin, & Zainuri, 2017; Rahajeng & Manaf, 2015). Salah satu aspek penting adalah pengembangan ekonomi, dengan sektor kepariwisataan menunjang laju pemerataan ekonomi Indonesia. Kepariwisata mengandung aspek penerimaan devisa, pemerataan pendapatan ekonomi rakyat, memperluas kesempatan kerja dan bahkan pariwisata saat ini dibebani pula satu pendekatan ekonomi dengan turut serta mengentaskan kemiskinan atau *pro poor tourism* (Gasong, 2018; Mudrikah, Sartika, Yuniarti, & Satia, 2014; Sujai, 2016). Hal ini sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 untuk *Sustainable Development Goals* (SDG's) di Indonesia 2045 (Purnama & Apriliani, 2018).

Kepariwisata sebagai salah satu kegiatan pembangunan diupayakan dapat sejalan dengan konsep dan prinsip pembangunan berkelanjutan, perlu menerapkan kaidah-kaidah sebagai berikut: (1) Pengembangan pariwisata berorientasi jangka panjang dan menyeluruh (*holistic*) tidak hanya memanfaatkan tetapi sekaligus melestarikan obyek dan daya tarik wisata yang memberikan manfaat secara adil bagi semua; (2) Pengembangan pariwisata yang sesuai dengan karakter wilayah, kondisi lingkungan, konteks sosial, dan dinamika budaya; (3) Penciptaan keselarasan, senergitas antara kebutuhan wisatawan dan penyedia oleh masyarakat lokal, yang memunculkan hubungan timbal balik dan saling menghargai nilai, adat istiadat, kebiasaan, warisan, budaya, dan lain-lain; (4) Pemanfaatan sumber daya pariwisata yang memperhitungkan kemampuan kelestariannya yang pengelolaannya secara *eco-efficiency* (*reduce, reuse, dan recycle*) sehingga mencapai *eco-effectivity* (*redistribute dan reactual*); dan (5) Pengelolaan kegiatan pariwisata yang tanggap terhadap perubahan yang terjadi dari kedua sisi permintaan (pasar) dan penawaran (produk) (Arida, 2014; Lubis, 2006; Mutaqin, 2017; Rizkianto & Topowijono, 2018; RPJMN, 2015; Saptari, 2000; Sastrayuda, 2010).

Kepariwisata sebagai pendorong laju pembangunan secara berkesinambungan, dibebani dua sasaran, yaitu sasaran sosio-ekonomi dan sosio-budaya (Prihanta et al., 2017; Waani, 2016). Pariwisata berperan sebagai penerimaan devisa, pemerataan pendapatan masyarakat, sekaligus pemerataan lapangan kerja. Pariwisata juga mendorong terpeliharanya kebudayaan nasional di daerah tujuan wisata baik yang bersifat material maupun immaterial (Erna & Budiningtyas, 2013; Khotimah & Wilopo, 2017; Mulyana, Huraerah, & Martiawan, 2019; Setyorini, 2004; Suwena & Widayatmaja, 2017). Dengan demikian usaha pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan saling terkait.

Secara implisit pembangunan pariwisata juga diharapkan mampu mendorong pembangunan daerah yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di suatu kawasan dengan cara mengurangi kesenjangan antar wilayah serta mendorong pemanfaatan potensi dan kapasitas masing-masing daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat membangun Pariwisata Nusantara dalam memupuk persatuan dan cinta tanah air (Mujanah, Ratnawati, & Andayani, 2016; Sutjipto, 2014; Trunajaya, 2016). Pembangunan pariwisata memerlukan konsep dan strategi yang jelas. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata pada pasal 8 menegaskan bahwa perencanaan pengembangan kepariwisataan dapat diatur melalui rencana induk pembangunan kepariwisataan. Pasal 8 tersebut menjelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional (RIPPNAS), rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi (RIPPDA Provinsi), dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota (RIPPDA Kabupaten/Kota). Hal ini berarti ada keterkaitan antara UU Nomor 10 tahun 2009 dengan rencana induk pengembangan kepariwisataan di tingkatan provinsi ataupun kabupaten/kota. Saling keterkaitan dokumen pengembangan tersebut adalah jika pada tingkat nasional pengembangan dan pembangunan kepariwisataan diatur dengan UU Nomor 10 tahun 2009, RPJP/RPJM, dan RIPPNAS. Destinasi provinsi diatur melalui RIPPDA Provinsi, sedangkan destinasi kabupaten/kota melalui RIPPDA Kabupaten/Kota. Sedangkan destinasi di tingkat kawasan diatur melalui rencana induk pengembangan kawasan dan di level daya tarik wisata diatur melalui rencana tapak kawasan dan desain teknis.

Pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan secara berkelanjutan bertujuan untuk turut mewujudkan peningkatan kepribadian dan kemampuan manusia dan masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya (IPTEKSB) serta memperhatikan perkembangan wilayah dan tantangan global. Melalui pembangunan kepariwisataan yang dilakukan secara komprehensif dan integral dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam, budaya dan kondisi geografis setempat secara arif dan bijaksana, maka diharapkan akan tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Salah satu bentuk nyata implementasi dari ketentuan tersebut adalah Ekowisata di Pantai Taman, Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Kabupaten Pacitan terbagi atas 12 Kecamatan dengan Kecamatan Ngadirojo adalah salah satunya dengan luas 94,22 km² (9.430,97 ha), berada pada ketinggian 0 – 700 mdpl. Kecamatan Ngadirojo secara administrasi terbagi atas 18 desa dengan dua desa sebagai lokasi PPM skim IbW ini adalah Hadiwarno dan Sidomulyo merupakan desa yang memiliki pantai, yaitu Pantai Sidomulyo, Teluk Segoro Anakan, dan pantai Taman. Salah satu faktor yang mendukung pengembangan ekowisata Pantai Taman adalah adanya pengembangan Jalur Lintas Selatan (Banyuwangi hingga Yogyakarta) merupakan jalur wisatawan Bali ke Yogyakarta. Jika kegiatan ekowisata di Pantai Taman terealisasi, akan menjadi embrio kawasan wisata unggulan di Kabupaten Pacitan.

Pembangunan ekowisata di Pantai Taman dilaksanakan dengan skema Pengabdian Kepada Masyarakat skim Ipteks bagi Wilayah (IbW) yang dilaksanakan dalam waktu 3 tahun, melibatkan kerjasama antar lembaga, yaitu Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) selaku pemberi dana, Universitas Muhammadiyah Malang dan Politeknik Negeri Malang sebagai pelaksana, dan Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagai mitra. Pada tahun I, kegiatan difokuskan pada konservasi penyu untuk wisata. Paradigma konservasi modern tidak hanya menekankan pada fungsi perlindungan (konservasi), namun juga harus menyentuh manfaat ekonomi dan sosial. Untuk itu konservasi penyu yang telah dilaksanakan pada tahun I dilanjutkan dengan pembangunan kawasan ekowisata pada tahun II yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, dan pada Tahun III bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat pelaku wisata.

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan pengabdian masyarakat yang difokuskan pada pengembangan ekowisata Pantai Taman Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan berorientasi konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Artikel ini memiliki kontribusi riil berupa contoh model pariwisata/ekowisata berbasis masyarakat yang pada garis besarnya berintikan tiga segi, yaitu ekonomi (sumber pendapatan), sosial (penciptaan lapangan kerja), dan kultural (memperkenalkan kebudayaan kepada ekowisatawan). Pariwisata dalam proses perkembangannya, juga memiliki dampak terhadap bidang sosial dan budaya. Pembangunan ekowisata di Pantai Taman merupakan upaya nyata dan sinergi Tim IbW (dari perguruan tinggi), Pemerintah Pusat (Kemenristekdikti), dan Pemerintah Daerah (Kabupaten Pacitan) untuk mengembangkan dan memanfaatkan obyek wisata dan daya tarik wisata, yang terwujud antara lain dalam bentuk keindahan alam dan keragaman flora dan fauna.

METODE

Konsep ekowisata di wilayah IbW

Pembangunan sektor pariwisata/ekowisata di Kabupaten Pacitan bertujuan untuk mengembangkan produk wisata yang unik dan memunculkan kekhasan daerah Pacitan. Konsep ekowisata dipilih karena telah menjadi *trend* dan dikembangkan di berbagai kawasan hutan dan pantai yang saling menguatkan dengan kegiatan konservasi. Ekowisata merupakan pergeseran dari pola wisata *mass tourism* ke *individual* atau *small group tourism*, sebagai bentuk dan kegiatan wisata yang bertumpu pada lingkungan dan bermanfaat secara ekologi, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat lokal serta bagi kelestarian sumberdaya alam dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Beberapa aspek utama dalam berkembangnya ekowisata adalah adanya keaslian lingkungan alam dan budaya, keberadaan dan dukungan masyarakat, pendidikan dan pengalaman, keberlanjutan, dan kemampuan manajemen dalam pengelolaan ekowisata. Ekowisata merupakan jawaban terhadap permasalahan bentuk pengelolaan pariwisata yang sesuai di kawasan konservasi, khususnya di Pantai Taman yang disinergikan dengan konservasi penyu (*sea turtle conservation*) pada Tahun I.

Model pelaksanaan pariwisata berupa pembentukan kawasan ekowisata berbasis masyarakat seperti disajikan pada Gambar 1. Pengertian ekowisata berbasis masyarakat merupakan usaha ekowisata yang dimiliki, dikelola dan diawasi oleh masyarakat setempat. Masyarakat berperan aktif dalam kegiatan pengembangan ekowisata dari mulai perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi. Hasil kegiatan ekowisata sebanyak mungkin dinikmati oleh masyarakat setempat. Jadi dalam hal ini, masyarakat memiliki wewenang yang memadai untuk mengendalikan kegiatan ekowisata.



Gambar 1. Model pemberdayaan masyarakat berbasis ekowisata

Kegiatan yang dilakukan

Mengacu kondisi dan potensi wilayah, RPJMD Kabupaten Pacitan 2011-2016, dan solusi permasalahan yang disepakati bersama, maka disusun rencana kegiatan yang ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kegiatan program IbW di Pantai Taman Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan

Nama Kegiatan	Aspek yang dilaksanakan
Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembentukan Kawasan Ekowisata	<ul style="list-style-type: none"> Konservasi lahan, tatanilai dan produk wisata. Isu konservasi lahan dan produk wisata berhubungan dengan nilai-nilai otentik yang memperlihatkan identitas kawasan. Hal ini membutuhkan perkuatan nilai-nilai budaya khas yang memperlihatkan lokal genius suatu kawasan agar tetap berkelanjutan; Berkembangnya kegiatan pariwisata yang mengusung jati diri keunggulan aspek fisik, ekonomi, sosial-budaya lokal; Penciptaan suasana kawasan wisata yang dapat dirasakan oleh semua masyarakat yang bermukim di kawasan (wisata) terpilih. Hal ini berkaitan dengan identitas, citra atau <i>image</i> kawasan ekowisata yang hendak diangkat dalam pengembangan kawasan wisata unggulan; Mantapnya citra kegiatan ekowisata di kawasan, yang didukung oleh kesiapan seluruh <i>stakeholders</i>; Pembagian peran antardesa, maupun koordinasi antar anggota tim yang terlibat dalam program IbW. Hal ini dilakukan melalui pembagian tugas dan fungsi semua pihak yang terlibat dalam program; dan Terintegrasinya tema konservasi penyus sebagai kawasan konservasi dan ekowisata dengan produk wisata pendukung lainnya di Kab. Pacitan.

Kontribusi pemerintah Pacitan pada kegiatan pengabdian

Keberhasilan program IbW di Pantai Taman Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan sangat bergantung kerjasama dengan semua institusi/lembaga terkait khususnya Pemerintah Kabupaten Pacitan. Beberapa bentuk kontribusi Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam program kegiatan IbW ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kontribusi Pemkab Pacitan dalam pelaksanaan IbW

No.	Institusi pemerintah Kabupaten Pacitan	Kontribusi
1.	Bupati Pacitan	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan persetujuan <i>sharing</i> pendanaan dalam kegiatan IbW, Memberikan persetujuan terhadap kegiatan IbW, dan Menyampaikan nota dinas kepada pihak-pihak terkait berupa dukungan terhadap kegiatan IbW.
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pacitan	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan informasi kebijakan dinas/ badan/ lembaga dan satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah kabupaten serta instansi Provinsi atau pusat di Kab. Pacitan, Memberikan data rencana tata ruang dalam lingkup makro di suatu wilayah, dan Memberikan pelayanan informasi, data kebijakan perencanaan dan pembangunan daerah.
3.	Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik (BALITBANGTIK) Kabupaten Pacitan	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan informasi Epoleksosbud di suatu wilayah, Memberikan data karya UMKM, Memberikan data kelayakan dan studi teknis lokasi pengembangan wilayah yang sudah dilaksanakan, dan Memberikan data pengelolaan benda cagar budaya berskala kabupaten yang sudah dilaksanakan.
4.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan (HUTBUN) Kabupaten Pacitan	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan SDM dalam pelaksanaan pengelolaan ekosistem hutan dan sumber daya air, dan Dukungan SDM dalam penyusunan konsep program pemberdayaan masyarakat pesisir.
5.	Camat Ngadirojo	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan pelayanan informasi terkait pengembangan kawasan Kec. Ngadirojo, dan Memberikan kemudahan aksesibilitas para pengabdian di wilayah Kec. Ngadirojo.
6.	Kepala Desa Hadiwarno dan Sudimulyo	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan lahan desa terkait dengan kegiatan "Revitalisasi Objek Wisata terintegrasi dengan Kawasan Ekowisata dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir", dan Memberikan kemudahan dan bentuk bantuan tenaga dan keamanan bagi semua tim IbW di dalam melaksanakan semua aktifitasnya selama masa program.

Metode kegiatan IbW

Metode kegiatan meliputi: (1) Inventarisir potensi wisata, (2) dengan memperhatikan kebijakan dan peraturan terkait, Menyusun strategi pengembangan daerah tujuan wisata, (3) bersama-sama dengan FGD, Menyusun *action plan*, yang diikuti dengan pembentukan organisasi pelaksanaan dan *steering committee*, (4) Menyusun tujuan dan sasaran pariwisata, (5) Sosialisasi program kegiatan, (6) Pembangunan kawasan ekowisata, dan (7) Monitoring, evaluasi dan pendampingan semua kegiatan program. Inventarisir meliputi: (1) Potensi wisata, yang bertujuan untuk mengetahui potensi kepariwisataan yang telah ada ataupun yang dapat dikembangkan di kawasan, (2) Daftar aset pariwisata yang ada di kawasan, meliputi: atraksi/ daya tarik wisata, promosi, infrastruktur, hospitality dan Pelayanan, serta (3) mengenali kepentingan pariwisata di kawasan. Dari ketiga aspek tersebut dapat dijabarkan kembali aspek mana yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kegiatan pariwisata di kawasan.

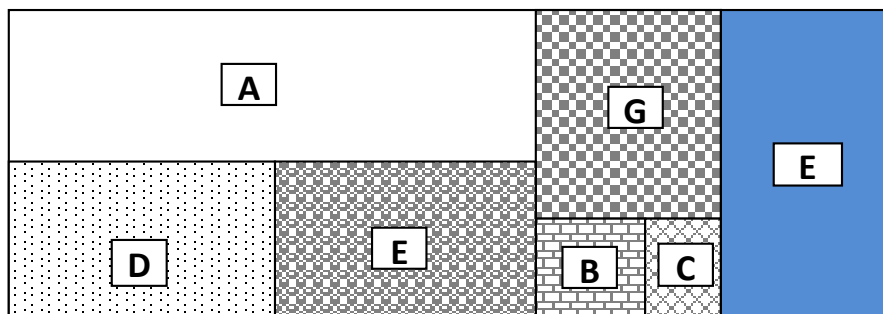
Hasil inventarisir potensi wisata, digunakan sebagai dasar penyusunan strategi pengembangan daerah tujuan wisata (DTW). Strategi pengembangan daerah tujuan wisata dapat dilakukan sebagai berikut: (a) Mendorong pengembangan daya tarik wisata pantai yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pemanfaatan lingkungan pantai untuk perlindungan, berintikan partisipasi aktif masyarakat, bermuatan pendidikan, pembelajaran dan rekreasi, berdampak negatif minimal, memberikan sumbangan positif terhadap pembangunan ekonomi daerah, yang diberlakukan bagi kawasan konservasi. (b) Meningkatkan kapasitas *stakeholders*, dalam hal ini meliputi: masyarakat, dalam bidang kampanye sadar wisata dan lingkungan; pelaku pariwisata, dalam bidang kualitas pelayanan dan pengembangan produk; dan

Pemerintah dan organisasi profesi (Dosen), dalam bidang perencanaan, komunikasi dan *leadership*); (c) Meningkatkan kualitas standar pelayanan transportasi (menuju lokasi, selama di lokasi dan ketika meninggalkan lokasi), fasilitas parkir, data informasi dan *hospitality*. (d) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi pengembangan daerah tujuan wisata. (e) Meningkatkan pemasaran promosi pariwisata pantai sesuai segmen pasar penyelenggaraan event pariwisata dan budaya dalam bentuk festival baik skala nasional/internasional, peta wisata, *website*, brosur, *booklet*, spanduk serta pameran di pasar wisata nasional dan/ atau internasional.

Tahapan selanjutnya adalah penyusunan *action plan*. *Action plan* merupakan dokumen perencanaan pengelolaan ekosistem pesisir, pemanfaatan sumber daya air dan pengembangan kelembagaan wisata yang menjadi rujukan operasional bagi pelaku/ atau pengelola berkaitan dengan jenis kegiatan, lokasi, biaya, pelaksana dan waktu pelaksanaan. *Action plan* ini berkaitan dengan spesifikasi tugas-tugas yang mencakup penugasan orang, alokasi sumber daya manusia, alokasi sumber daya material dan finansial, dan jadwal untuk penyelesaian tugas tersebut. *Action plan* memuat kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan pencapaian setiap sasaran sehingga harus disusun berdasarkan prioritas, tujuan, indikator, kerangka waktu dan sistem pemantauan. *Action plan* pariwisata mencakup siapa, apa, di mana, kapan dan bagaimana membuat kegiatan pariwisata dapat berjalan. Kondisi ini tentu harus dapat dilihat dari berbagai sudut pandang pelaku kepentingan, tidak saja pemerintah daerah setempat, namun juga pelaku industri pariwisata, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, maupun *stakeholder* lainnya.

Tahap selanjutnya adalah sosialisasi program melalui penyuluhan, pembuatan brosur, *booklet*, maupun sosialisasi melalui media massa. Hal ini dilakukan untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat sekitar maupun masyarakat luar yang mengunjungi kawasan. Ekowisata merupakan upaya untuk memaksimalkan dan sekaligus melestarikan potensi sumber-sumber alam untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan yang berkesinambungan.

Tahap akhir adalah pembangunan kawasan ekowisata. Kawasan ekowisata meliputi kawasan konservasi penyu (Gambar 2), kawasan penyangga, lokasi kolam biota laut, lahan reboisasi, akses jalan (Gambar 3) dan sebagainya. Selama kegiatan berlangsung, tim IbW akan selalu mengadakan monitoring dan evaluasi agar arah kegiatan sesuai dengan *action plan* yang sudah disepakati.



Gambar 2. Kawasan konservasi penyu. Keterangan: (A) Halaman yang ditumbuhi pepohonan, (B) Ruang yang dapat digunakan untuk pertemuan maupun pemanduan pengunjung, (C) Gudang, (D) Kantor dan tempat arsip dan data, (E) Kolam untuk pemeliharaan anak penyu yang menetas sebelum dilepaskan, (F) Tempat penetasan telur penyu, dan (G) Kolam Karantina.



Gambar 3. Kawasan konservasi penyu dan penyangganya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konservasi penyu

Tim pelaksana kegiatan pada tahun I (2015) telah membangun area konservasi penyu dan lingkungannya di Pantai Taman, Desa Hadiwarno. Untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi selain makna perlindungan, maka Tim IbW telah membangun beberapa wahana wisata di kawasan konservasi. Wahana yang sudah dibangun untuk menunjang kegiatan konservasi penyu adalah (Gambar 4): (1) Tempat penetasan telur atau *hatcheries*, (2) Kolam pembesaran tukik, (3) Kolam pembesaran penyu, dan (4) Fasilitas penunjang wisata, antara lain (a) Fasilitas kantor konservasi, (b) Kolam renang air tawar, (c) *Flying fox* terpanjang nasional 467 meter.



Gambar 4. Fasilitas konservasi penyu

Pembangunan kawasan pesisir

Pembangunan wilayah pesisir menghendaki adanya kerjasama dari semua *stakeholders*, yaitu pemerintah daerah cq Pemda Kab. Pacitan, masyarakat pesisir, dan Perguruan Tinggi. Para pihak yang memiliki kepentingan terhadap pemanfaatan sumberdaya alam di kawasan pesisir telah menyusun perencanaan pengelolaan terpadu yang dapat mengakomodir segenap kepentingan dengan menggunakan model pendekatan dua arah yaitu pendekatan *top down* dan *bottom up*. Pembangunan wilayah pesisir juga menghendaki adanya keterpaduan pendekatan sebab pengelolaan wilayah pesisir memiliki keunikan wilayah dan beragamnya sumberdaya yang mengisyaratkan pentingnya pengelolaan wilayah tersebut secara terpadu.

Beberapa alasan yang mendasari pentingnya pembangunan kawasan pesisir dan pe-ngelolaannya secara terpadu adalah bahwa (1) secara empiris, terdapat keterkaitan ekologis baik antar ekosistem di dalam kawasan pesisir maupun antara kawasan pesisir dengan lahan atas dan laut lepas. Dengan demikian perubahan yang terjadi pada suatu ekosistem pesisir, misalnya hutan pantai, cepat atau lambat akan memengaruhi ekosistem lainnya. Berdasarkan hal ini, maka Tim lbW membuat model pembangunan kawasan pantai yang dinamakan hutan keabadian (Gambar 5). Diharapkan, pengunjung bisa melihat model pembangunan kawasan pesisir secara arif atau berwawasan lingkungan, sehingga dampak negatifnya terhadap tanaman dan/atau fungsi ekologis kawasan pesisir tidak terjadi. (2) Dalam satu kawasan pesisir biasanya terdapat lebih dari satu jenis sumberdaya alamiah (misalnya pantai) dan jasa-jasa lingkungan yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat. Untuk maksud ini, Tim lbW Kec. Ngadirojo telah melaksanakan restorasi ekologi hutan pantai (Gambar 6). (3) Dalam suatu kawasan pesisir biasanya terdapat lebih dari satu kelompok masyarakat yang memiliki keterampilan atau keahlian dan kesenangan bekerja yang berbeda, seperti: nelayan, petani tambak, pedagang, pendamping pariwisata, pedagang makanan dan minuman, dan sebagainya. Tim lbW telah ikut memberdayakan dan meningkatkan hasil ekonomi mereka dengan kedatangan ekowisatawan ke lokasi wisata. (4) Baik secara ekologis maupun secara ekonomis, pemanfaatan suatu kawasan pesisir secara monokultur (*single use*) sangat rentan terhadap perubahan internal maupun eksternal yang menjerus pada kegagalan usaha. Oleh karena itu, Tim lbW juga telah menggunakan berbagai potensi alamiah yang ada secara arif dan bijaksana untuk pemanfaatannya secara berkelanjutan. (5) Kawasan pesisir merupakan sumberdaya milik bersama yang dapat digunakan oleh siapa saja di mana setiap pengguna sumberdaya pesisir biasanya berprinsip memaksimalkan keuntungan. Hal ini menyebabkan kawasan pesisir rawan terkena masalah pencemaran, *over-exploitation* sumberdaya alam, dan konflik pemanfaatan ruang.



Gambar 5. Pembangunan hutan keabadian



Gambar 6. Restorasi ekologi hutan pantai

Penguatan konservasi penyu

Beberapa jenis penyu mendarat ke Pantai Taman ini untuk bertelur. Oleh karena itu, tim IbW Kec. Ngadirojo sejak 2014 telah melakukan kegiatan penangkaran penyu yang dimodifikasi. Tujuannya adalah untuk membantu dan mendukung upaya konservasi penyu, yaitu dengan meningkatkan peluang hidup penyu sebelum dilepas ke alam. Begitu telur penyu menetas, tukik tidak langsung dilepas ke laut. Selain untuk kepentingan mendukung upaya konservasi penyu, kegiatan penangkaran penyu diadakan untuk beberapa kepentingan pendidikan, penelitian, dan wisata. Sehingga sejumlah tukik hasil penetasan semi alami disisihkan untuk dibesarkan. Jumlah tukik yang dibesarkan hanya sebagian kecil dan tergantung fasilitas penangkaran yang menjamin tukik dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Tukik yang telah berkembang kemudian dibesarkan dalam kolam pembesaran penyu. Untuk menjamin kesehatan penyu, Tim IbW telah membuat sumur air laut (Gambar 7) yang menjamin ketersediaan pasokan air laut yang dipompa ke dalam kolam pembesaran penyu.



Gambar 7. Pembuatan sumur air laut untuk kolam penyu

Pasir merupakan tempat yang mutlak diperlukan untuk penyu bertelur. Habitat peneluran bagi setiap penyu memiliki kekhasan. Umumnya tempat pilihan bertelur merupakan pantai yang luas dan landai serta terletak di bagian atas pantai dengan rata-rata kemiringan 30° di pantai bagian atas. Keberadaan pohon-pohon, baik dari formasi *Pes-caprae* maupun

Barringtonia, di sepanjang pantai peneluran menjadi penting karena dapat menjadi naluri peneluran penyu. Oleh karena itu tim IbW pada 2016 telah melakukan kegiatan rehabilitasi habitat bertelur penyu dengan cara membuat model pembibitan vegetasi hutan pantai (Gambar 8) yang sesuai dengan topografi dan ekologi hutan pantai selatan Jawa.



Gambar 8. Pembibitan vegetasi hutan pantai

Pembuatan kolam biota laut

Kolam biota laut yang dimaksudkan di sini merupakan wadah yang dibuat untuk menampung air laut dalam jumlah tertentu sehingga dapat digunakan untuk memamerkan dan mempertunjukkan keindahan bentuk, warna, dan keunikan serta tingkah laku berbagai macam biota laut. Keanekaragaman jenis biota laut dengan berbagai karakter seperti warna, sifat, habitat, dan perilakunya dapat dinikmati sebagai sarana rekreasi sekaligus menambah pengetahuan tentang dunia bawah laut. Biota laut adalah semua makhluk hidup yang ada di laut baik hewan, tumbuhan maupun karang. Sepertinya tidak ada ekosistem yang sedemikian menakjubkan dan semenarik lingkungan dasar laut, baik dalam hal kombinasi warna, bentuk, kehidupan, tingkah laku dan keunikan variasi adaptasi pada masing-masing organisme. Pemandangan yang indah ini hanya dapat dilihat secara langsung oleh para penyelam dan sebagian dapat dilihat melalui layar kaca, buku, majalah, dan media cetak yang lain.

Keragaman hayati (*biodiversity*) yang cukup tinggi, seperti: hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, rumput laut, dan hasil perikanan, merupakan kekayaan sumber daya alam pesisir. Secara ekologis, ekosistem laut dan pesisir yang menyediakan sumber daya alam ini saling terkait satu sama lain, bahkan dengan perilaku dan aktivitas manusia di dalamnya. Laut dan pesisir memiliki kawasan hutan mangrove, padang lamun dan terumbu karang. Ketiga ekosistem ini terkait satu sama lain dan memiliki potensi ekologis serta potensi ekonomi terutama sebagai penyangga perikanan. Mangrove dan padang lamun menjadi tempat pemijahan dan berlindung bagi anakan ikan serta hewan lunak lainnya. Sementara ekosistem terumbu karang menjadi habitat dan pembesaran bagi ikan-ikan. Kawasan terumbu karang juga menjadi penghalang bagi gelombang dan arus, sementara mangrove dan padang lamun berfungsi sebagai pencegah abrasi pantai dan pelumpuran perairan laut. Karena itu, kegiatan yang berakibat kerusakan atau perubahan atas salah satu ekosistem tersebut dapat memberi dampak terhadap ekosistem lainnya, atau komponen yang membentuk ekosistem.

Tujuan pembuatan kolam biota laut adalah sebagai berikut: (1) Membangun kesadaran, pengetahuan lingkungan, konservasi sumber daya laut dan pesisir dan menginternalisasikan nilai-nilai etika hubungan manusia dengan alam secara arif dan bijaksana bagi segenap ekowisatawan; (2) Membuat model konservasi ekosistem biota laut dan lingkungan pendukungnya kepada masyarakat di wilayah pesisir, agar mereka memiliki kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya alam pesisir, melakukan usaha memelihara keseimbangan ekosistem serta melindungi ekosistem pesisir dari kerusakan; (3) Memberikan fasilitas rekreasi dan hiburan wisata alam wilayah pantai termasuk interaksi ekowisatawan dengan habitat wilayah pantai serta sarana penyaluran hobi; (4) Menambah pengetahuan mengenai kehidupan bawah laut secara langsung bagi ekowisatawan yang datang berkunjung ke Pantai Taman berupa *underwater observatorium*; (5) Melestarikan flora fauna laut iklim tropis dalam bentuk kolam penangkaran biota laut yang nanti pengelolaannya bekerja sama dengan masyarakat; (6) Melestarikan ekosistem mangrove dan terumbu karang yang ada di sepanjang pantai yang ada di Kab. Pacitan di mana tidak banyak orang mengetahuinya; dan (7) Menyediakan wahana yang memenuhi keperluan pendidikan dan penelitian mengenai kehidupan bawah laut. Untuk kenyamanan ekowisatawan, Tim IbW juga melengkapi kolam biota laut dengan fasilitas sanitasi (Gambar 9).



Gambar 9. Pembuatan kolam biota laut dan fasilitas sanitasi

Pembangunan *shelter* dan gazebo

Kebutuhan *shelter* di area pasir pantai merupakan hal yang perlu dibangun untuk mengakomodir ekowisatawan untuk berteduh dari terik sinar matahari. Selain itu, *shelter* juga memberikan keintiman dan menunjang interaksi lebih bagi komunitas yang berwisata sehingga ekowisatawan dapat lebih menikmati keindahan pantai. Dari sudut pandang pengelola ekowisata Pantai Taman, *shelter* dapat memberi nilai tambah bagi estetika pantai dan melibatkan peran aktif dari masyarakat setempat untuk lebih merawat pantai.

Shelter merupakan tempat berlindung atau berteduh bagi ekowisatawan dari kondisi eksternal. *Shelter* dapat menjadi sarana untuk memicu interaksi lebih bagi suatu komunitas di bawah naungannya. Ketika wisatawan merasa nyaman, maka keindahan alam pantai wisata pun dapat lebih dihayati bagi ekowisatawan. Pengembangan pembangunan desain *shelter* ini menjadi sarana untuk pemberdayaan masyarakat guna memaksimalkan potensi wisata pantai Taman dan memberi efek peningkatan kesadaran wisata yang sejalan dengan program konser-vasi berbasis mangrove menuju *wisata bersih sehat* (WBS). Diharapkan melalui sarana *shelter* ini masyarakat sekitar pesisir akan dapat lebih menjaga aset-aset kawasan wisata dan menunjang kenyamanan berwisata bagi ekowisatawan serta mampu memperbaiki pantai Taman dari segi estetika dan penataan ruang (Gambar 10).



Gambar 10. Pembangunan *shelter* dan gazebo

Pembangunan infrastruktur ekowisata

Pembangunan kawasan wisata berbasis konservasi penyu di Pantai Taman, Desa Hadiwarho, Ngadirojo-Pacitan adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Untuk dapat mengembangkan objek daerah tujuan wisata (ODTW) pada kawasan wisata berbasis konservasi penyu, Tim PPM skim IbW berusaha mengakomodir sarana dan prasarana penunjang kegiatan berwisata. Dalam hal ini, Tim IbW membangun infrastruktur minimum, yang didefinisikan sebagai infrastruktur dari ODTW untuk dapat memberikan kenyamanan dalam berwisata seperti tempat peristirahatan (*gazebo*, *shelter*), toilet, tempat parkir (Gambar 11).

Istilah ekowisata (*ecotourism*) dapat diartikan sebagai perjalanan oleh seorang wisatawan dengan tujuan menikmati dan mempelajari mengenai alam, sejarah, dan budaya di suatu daerah, di mana pola wisatanya membantu ekonomi masyarakat lokal dan mendukung pelestarian alam. Pembangunan infrastruktur pariwisata secara berlebihan justru pada akhirnya menyebabkan perlindungan terhadap keunikan kawasan wisata menjadi tersisih dikalahkan oleh industri pariwisata massal. Padahal salah satu tujuan ekowisata harus mampu manjabarkan nilai kearifan lingkungan dan sekaligus mengajak orang untuk menghargai apapun yang walaupun tampaknya teramat sederhana. Pada hakikatnya dengan kesederhanaan itulah yang menjadi pedoman masyarakat sekitar kawasan wisata mempertahankan kelestarian alamnya. Dengan demikian keterlibatan masyarakat sekitar sebagai pengawas menjadi teramat penting. Hal lain yang harus diperhatikan adalah perkembangan budaya dalam masyarakat asli di sekitar kawasan ekowisata yang berbeda dengan

budaya para wisatawan. Disadari atau tidak lambat laun akan terjadi pergeseran budaya yang mungkin dapat melenyapkan budaya asli. Idealnya dalam suatu kawasan ekowisata timbul suatu keterikatan dan rasa saling menghormati antar komunitas penduduk asli dengan wisatawan.



Gambar 11. Pembangunan lahan parkir

Kehadiran wisatawan (khususnya ekowisatawan) ke kawasan wisata berbasis konservasi penyu di Pantai Taman (gbr. 5.8), memberikan peluang bagi penduduk setempat untuk memperoleh penghasilan alternatif. Misalnya menjadi pemandu wisata, membuka *homestay* atau *ecolodge* (pondok wisata), warung, dan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata. Peluang usaha ini dapat meningkatkan kesejahteraan atau kualitas hidup mereka baik materiil dan spirituil maupun kultural dan intelektual. Di samping berbagai dampak yang dinilai positif, terdapat pula dampak yang tidak diharapkan. Misalnya, kekhawatiran akan makin rusaknya lingkungan hidup oleh pembangunan pariwisata yang bersifat eksploitatif terhadap sumber daya alam, kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat, dan timbulnya ketimpangan ekonomi akibat akses yang tidak sama terhadap sumber daya alam. Sehingga, fokus utama dari pengembangan ekowisata berbasis konservasi penyu ini didasarkan atas potensi dasar kepariwisataan di mana kelestarian alam dan budaya lokal dikedepankan, dengan tidak mengembangkan wisata dan infrastruktur yang bersifat massal.

Pembangunan ekowisata berbasis masyarakat

Pola pembangunan ekowisata berbasis masyarakat (*community-based ecotourism*) adalah pola pengembangan ekowisata yang mendukung dan memungkinkan keterlibatan penuh oleh masyarakat setempat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan usaha ekowisata dan segala keuntungan yang diperoleh. Ekowisata berbasis masyarakat merupakan usaha ekowisata yang memprioritaskan peran aktif masyarakat. Masyarakat setempatlah yang memiliki pengetahuan tentang keragaman flora dan fauna serta budaya yang menjadi potensi dan nilai jual sebagai daya tarik wisata, sehingga pelibatan masyarakat menjadi mutlak. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata berarti mengakui hak masyarakat lokal dalam mengelola kegiatan wisata di kawasan yang mereka miliki secara adat ataupun sebagai pengelola. Model ini juga akan mencegah terjadinya kecemburuan sosial dan adanya kemungkinan upaya masyarakat melakukan aksi destruktif terhadap objek wisata atau sarana yang ada pada objek wisata tersebut.

Mengingat akan hal ini, maka Tim IbW telah melakukan pelebaran jalan lingkaran untuk akses ke luar kawasan. Dampak pengelolaan berbasis komunitas, masyarakat yang lahannya terkena dampak pelebaran jalan dengan senang hati memotong pohon dan tanaman yang menghalangi jalan (Gambar 12). Hal ini karena disadari semua *stakeholder*, bahwa semua aktivitas ekowisatawan di suatu objek wisata akan memberi kontribusi nyata terhadap perekonomian masyarakat setempat.



Gambar 12. Pelebaran jalan lingkaran kawasan ekowisata

Pemberdayaan masyarakat ekowisata

Sektor pariwisata didorong untuk menjadi lokomotif atau penggerak ekonomi kawasan cq. Pantai taman, desa Hadiwarno, Kec. Ngadirojo, Kab. Pacitan. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang pariwisata diarahkan pada penguasaan kompetensi di bidangnya. Salah satu bentuk sumbangsih nyata sektor pariwisata adalah meliputi aspek pemberdayaan masyarakat di sekitar objek wisata, di mana masyarakat dilibatkan langsung dalam berbagai kegiatan yang nantinya dapat dijadikan bekal bagi pengembangan usaha, khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Gambar 13).



Gambar 13. UMKM di sekitar kawasan ekowisata

Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar objek wisata yang akan dilakukan Tim lbW bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat pembangunan pariwisata juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alamnya, mendorong masyarakat untuk menghargai, memelihara dan melestarikan objek wisata. Sedangkan sasaran pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pariwisata ini adalah terciptanya masyarakat pariwisata yang lebih terampil dan berdaya guna dalam mengem-bangkan potensi ekowisatanya, serta tersedianya masyarakat yang siap dan sigap untuk menjadi tuan rumah yang baik, serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Adapun kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pariwisata meliputi penyuluhan-penyuluhan pariwisata dan sadar wisata, manfaat koperasi, penyuluhan tentang UMKM, serta kewirausahaan berupa teknik-teknik pengolahan makanan dan kerajinan batik dari bahan lokal. Disadari oleh Tim lbW Kec. Ngadirojo bahwa *feedback* dari masyarakat yang dihasilkan lewat program pemberdayaan masih belum dirasakan. Kondisi hidup dan tingkat pendapatan serta kesejahteraan masyarakat pada daerah pariwisata masih belum meningkat secara signifikan. Di sisi lain potensi lokal masyarakat daerah pariwisata itu belum dapat ditampilkan secara maksimal. Banyak hal yang menjadi kendala dalam pengembangan Pantai Taman sebagai kawasan ekowisata berbasis konservasi penyu.

Permasalahan ini muncul karena kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tidak disertai dengan pendampingan secara rutin dan berkesinambungan. Kegiatan yang dilakukan belum sampai membuat masyarakat merasa terus termotivasi untuk mengoptimal-kan segala potensi yang ada pada dirinya dan lingkungannya. Pendampingan yang dimaksud juga belum sampai ke jalur pemasaran. Tim lbW juga akan memberi pelatihan tentang pemasaran dengan strategi **8P + 1C**, yaitu: **product, place, price, promotion, people, physical evidence, process, productivity and quality**, dan **customer service**. Hal ini dilakukan untuk mencapai pengembangan ekowisata yang berkelanjutan.

Penguatan kawasan ekowisata

Kawasan pesisir dengan sumber daya alamnya telah menjadi tumpuan bagi pengembangan ekonomi bangsa. Ekosistem pantai dan mangrove di kawasan pesisir memiliki fungsi ekologis dan ekonomi. Pengelolaan sumber daya pesisir pada prinsipnya adalah proses pengelolaan terhadap seluruh komponen dari ekosistem mangrove dan pantai termasuk manusia dengan berbagai aspek sosial dan ekonominya. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan sumber daya alam pesisir harus dilakukan dengan pendekatan terpadu. Pengelo-laan sumberdaya pesisir termasuk upaya konservasinya haruslah dipandang sebagai satuan sistem yang utuh, sementara keberadaan dan keberlanjutan sumber daya alam pesisir sangatlah ditentukan oleh komponen manusia dan keputusan dari para pengambil kebijakan.

Konservasi penyu merupakan upaya yang sangat penting untuk menjamin keberlan-jutan program ODTW berbasis penyu. Tim lbW telah membuat tata ruang wilayah atau area yang akan menjadi obyek ekowisata berbasis konservasi penyu. Beberapa ruang yang sudah dibangun adalah kantor pengelolaan dan pusat informasi penyu, lokasi peneluran penyu, lokasi penetasan semi alami, kolam pemeliharaan tukik, kolam pembesaran penyu, kolam karantina penyu dan lokasi pelepasan tukik. Termasuk di dalamnya desain vegetasi-vegetasi pantai yang sesuai dengan habitat penyu.

Pemilihan lokasi konservasi dan ekowisata di Pantai Taman didasarkan pada potensi lokasi yang dekat dengan jalan raya dan memiliki akses pencapaian yang mudah. Sedangkan pendekatan desain yang digunakan adalah RTRW berwawasan lingkungan dengan konsep makro natural, konsep mikro lahan kejelasan pemanfaatannya, konsep mikro bentuk rekreatif, dan konsep mikro ruang adaptif bentuk. Dalam perencanaan dan perancangan kawasan ekowisata ini, diharapkan dapat memberikan suasana yang sesuai dan menyatu dengan kondisi alam sekitar.

Konsep pengembangan bentuk rekreatif ekowisata merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek-aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh tim IbW Kec. Ngadirojo terkait penembangan ekowisata di Pantai Taman ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Prinsip dan kriteria ekowisata

Prinsip Ekowisata	Kriteria Ekowisata
1. Memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan alam dan budaya, melaksanakan kaidah-kaidah usaha yang bertanggungjawab dan ekonomi berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> – Memperhatikan kualitas daya dukung lingkungan kawasan ODTW melalui pelaksanaan sistem zonasi; – Mengelola jumlah pengunjung, sarana dan fasilitas sesuai dengan daya dukung lingkungan daerah ODTW; – Meningkatkan kesadaran dan apresiasi para pelaku terhadap lingkungan alam; – Memanfaatkan sumber daya lokal secara lestari dalam penyelenggaraan kegiatan ekowisata; – Meminimumkan dampak negatif yang ditimbulkan dan bersifat ramah lingkungan; – Mengelola usaha secara sehat; dan – Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekowisata yang sehat.
2. Pengembangan harus mengikuti kaidah-kaidah ekologis dan atas dasar musyawarah dan pemufakatan dengan masyarakat lokal.	<ul style="list-style-type: none"> – Membuat <i>action plan</i> yang terpadu dalam pengembangan kawasan ekowisata; – Membangun hubungan kemitraan dengan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengelolaan ekowisata; – Menggugah prakarsa dan aspirasi masyarakat lokal untuk pengembangan ekowisata; – Menginformasikan secara jelas dan benar konsep dan tujuan pengembangan kawasan tersebut kepada masyarakat lokal; dan – Membuka kesempatan untuk melakukan dialog dengan seluruh pihak yang terlibat (<i>multi-stakeholders</i>) dalam proses perencanaan dan pengelolaan ekowisata.
3. Memberikan manfaat kepada masyarakat lokal.	<ul style="list-style-type: none"> – Membuka kesempatan kepada masyarakat lokal untuk membuka usaha ekowisata dan menjadi pelaku-pelaku ekonomi kegiatan baik secara aktif maupun pasif; – Memberdayakan masyarakat lokal dalam upaya peningkatan usaha ekowisata untuk meningkatkan kesejahteraan mereka; dan – Meningkatkan ketrampilan masyarakat lokal dalam bidang-bidang yang berkaitan dan menunjang pengembangan ekowisata.
4. Peka dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan masyarakat lokal.	<ul style="list-style-type: none"> – Menetapkan kode etik ekowisata bagi ekowisatawan, pengelola dan pelaku usaha ekowisata; – Melibatkan masyarakat setempat dan pihak-pihak lainnya (<i>multi-stakeholders</i>) dalam penyusunan kode etik wisatawan, pengelola dan pelaku usaha ekowisata; – Melakukan pendekatan, meminta saran-saran dan mencari masukan dari tokoh/pemuka masyarakat lokal pada tingkat paling awal sebelum memulai langkah-langkah dalam proses pengembangan ekowisata; dan – Melakukan pemetaan dan pengenalan aspek-aspek sosial budaya masyarakat lokal sebagai bagian terpadu dalam proses perencanaan dan pengelolaan ekowisata.
5. Memperhatikan perjanjian, peraturan, perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun internasional.	<ul style="list-style-type: none"> – Memperhatikan dan melaksanakan secara konsisten: Dokumen-dokumen Internasional yang mengikat (Agenda 21, Habitat Agenda, Sustainable Tourism, Bali Declaration dsb.). GBHN Pariwisata Berkelanjutan, Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku. – Menyusun peraturan-peraturan baru yang diperlukan dan memperbaiki dan menyempurnakan peraturan-peraturan lainnya yang telah ada sehingga secara keseluruhan membentuk sistem per- UU-an dan sistem hukum yang konsisten; – Memberlakukan peraturan yang berlaku dan memberikan sanksi atas pelanggaran secara konsekuen sesuai dengan ketentuan yang berlaku (<i>law enforcement</i>); dan – Membentuk kerja sama dengan masyarakat setempat untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap dilanggarnya peraturan yang berlaku.

Penguatan kawasan ekowisata yang akan dilakukan oleh tim IbW Kec. Ngadirojo-Kab. Pacitan adalah penguatan aspek kewilayahan kawasan konservasi dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Beberapa hal yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: (a) Sosialisasi, yakni penyebaran nilai atau materi kepada individu-individu (pelaku, ekowisatawan dan masyarakat local) agar mempunyai pengetahuan, pengertian dan pemahaman sesuai dengan yang diharapkan; (b) Optimalisasi, artinya materi yang ditransformasikan diharapkan dapat dipahami, diketahui, diyakini, dan dilaksanakan secara menyeluruh/ maksimal; (c) Peningkatan, artinya penguatan dilakukan sebagai upaya peningkatan agar mempunyai kualitas yang diharapkan; (d) Pembaharuan, suatu perubahan yang baru dan berbeda dengan sebelumnya untuk menjadi lebih baik dan meningkat sesuai dengan standart yang diinginkan; (e) Pengembangan, yaitu mengembangkan SDM terhadap upaya konservasi terhadap ekosistem kawasan; dan (f) Pencegahan, dilakukan untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungan yang dapat timbul akibat adanya kegiatan ekowisata.

Revitalisasi kolam biota laut

Kolam biota laut yang dibuat oleh tim IbW merupakan suatu kolam berukuran 40m x 14m x 1m ($\pm 560\text{m}^3$) yang dapat memamerkan dan memper-tunjukkan keindahan bentuk, warna dan keunikan serta tingkah laku berbagai macam biota laut. Kolam biota laut merupakan suatu potongan ekosistem kecil yang diadaptasi dari lingkungan alam yang sebenarnya dengan suatu pendekatan tertentu yang memungkinkan organisme dapat hidup. Kolam biota laut didesain semirip mungkin dengan suasana laut lepas sebenarnya yang menampilkan keanekaragaman kehidupan biota laut. Keanekaragaman jenis biota laut, misalnya: terumbu karang, berbagai jenis ikan dan udang, dengan berbagai karakter seperti warna, sifat, habitat dan perilakunya dapat dinikmati ekowisatawan sebagai sarana rekreasi sekaligus menambah pengetahuan tentang dunia bawah laut.

Sampai dengan bulan Desember 2016, tim IbW telah menyelesaikan 100% pekerjaan pembangunan kolam biota laut. Pemasangan terpal plastik berbahan dasar HDPE (*high density poliester ethylene*) berdimensi 23m x 47m telah dilakukan. Penguatan tanggul dengan pengecoran telah dilakukan pada keempat sisi (Gambar 14). Pekerjaan selanjutnya berupa pembuatan fasilitas sanitasi di sekitar areal kolam biota laut juga telah rampung dikerjakan.



Gambar 14. Sisa pekerjaan kolam biota laut

Adanya pola ekowisata berbasis masyarakat bukan berarti bahwa masyarakat akan menjalankan usaha ekowisata sendiri, tetapi secara simultan dan terintegrasi menjalankannya bersama segenap penggiat wisata di tempat itu. Mulai dari level komunitas, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan Perguruan Tinggi. Implementasi ekowisata perlu dipandang sebagai bagian dari perencanaan pembangunan terpadu yang dilakukan di suatu daerah. Sehingga pelibatan semua *stakeholders* diharapkan membangun suatu jaringan dan menjalankan suatu kemitraan yang baik sesuai peran dan keahlian masing-masing.

Ekowisata membawa dampak positif terhadap pelestarian lingkungan dan budaya asli setempat yang pada akhirnya diharapkan akan mampu menumbuhkan jati diri dan rasa bangga antar penduduk setempat yang tumbuh akibat peningkatan kegiatan ekowisata. Di kawasan ekowisata juga terdapat kawasan *three in one*, yaitu: berbuat satu dapat tiga manfaat. Jika pemerintah dan masyarakat dapat mengembangkan Ekowisata pesisir dan laut, maka akan diperoleh tiga manfaat sekaligus, yaitu: (1) kelestarian sumberdaya pesisir dan laut terjamin, (2) kesejahteraan masyarakat meningkat, dan (3) tidak perlu mengeluarkan biaya konservasi sumberdaya pesisir dan laut karena kelestarian sumberdaya akan terjaga dengan sendirinya jika dikelola dengan baik.

Beberapa manfaat yang diperoleh dari kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekowisata, adalah: (1) peningkatan penghasilan dan devisa Negara, (2) tersedianya kesempatan kerja baru, (3) berkembangnya usaha-usaha baru, (4) meningkatnya kesadaran masyarakat dan wisatawan tentang pentingnya konservasi sumberdaya alam, (5) peningkatan partisipasi masyarakat, dan (6) meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Manfaat lain dari kegiatan ekowisata berbasis masyarakat dapat berupa: (1) meningkatnya nilai ekonomi sumberdaya ekosistem, (2) Meningkatnya upaya pelestarian lingkungan, (3) meningkatnya keuntungan langsung dan tidak langsung dari para *stakeholders*, (4) terbangunnya konstituensi untuk konservasi secara lokal, nasional, dan internasional, (5) meningkatnya promosi penggunaan sumberdaya alam secara berkelanjutan, dan (6) berkurangnya ancaman terhadap keanekaragaman hayati yang ada di objek wisata.

Dalam melakukan kegiatan ekowisata berbasis tindak konservasi, keberadaan habitat dan populasi penyu serta masyarakat akan saling berkaitan sehingga harus diperhitungkan selain pengetahuan mengenai penyu itu sendiri. Informasi mengenai biologi, misalnya demografi, tingkah laku, dan fisiologi penyu merupakan perangkat penting dalam mengembangkan strategi pengelolaan pariwisata berbasis konservasi penyu di Pantai Taman, Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Kegiatan ini merupakan tindakan nyata yang dibutuhkan dalam melakukan pengelolaan konservasi penyu yang komprehensif, sistematis, dan terukur.

Pantai Taman, Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan merupakan kawasan konservasi penyu diwujudkan dengan diserahkannya lahan negara seluas 10 ha untuk pengembangan kawasan (Perdes No.7 Tahun 2012). Salah satu alasan penyerahan lahan menjadi kawasan konservasi penyu yaitu karena Pantai Taman memiliki organisme spesifik atau endemik yang menjadi daya tarik wisatawan yakni penyu sehingga dalam keberlanjutannya sangat perlu untuk dikonservasi.

Kawasan konservasi penyu mempunyai peranan yang sangat penting baik secara ekologis, ekonomis, dan sosial budaya sehingga pengelolaannya bisa menjadi prioritas utama. Tujuan dibentuknya kawasan konservasi penyu adalah untuk melindungi seluruh sistem sosial-ekologi, meningkatkan status sosial-ekonomi masyarakat lokal, dan mengembangkan ekowisata dengan mendorong pelestarian keanekaragaman hayati (*biodiversity*). Pengelolaan kawasan konservasi penyu yang efektif tidak hanya melindungi keanekaragaman hayati tetapi juga akan mendukung pengelolaan pesisir berkelanjutan dan peningkatan ekonomi melalui aktivitas ekowisata.

Kawasan konservasi dan ekowisata merupakan satu kesatuan yang saling mendukung di mana konsep dari pengembangan ekowisata sejalan dengan misi pengelolaan kawasan konservasi penyu. Ekowisata yang dijalankan di Pantai Taman, Desa Hadiwarno, Kec. Ngadirojo, Kab. Pacitan merupakan strategi dalam pengembangan kawasan konservasi penyu berbasis masyarakat, di mana keduanya merupakan simbiosis mutualisme. Ekowisata memerlukan kawasan konservasi penyu dan sebaliknya kawasan konservasi memerlukan ekowisata.

Penyu (*sea turtle*) mempunyai pertumbuhan yang sangat lambat dan memerlukan usia puluhan tahun untuk mencapai usia reproduksi (sekitar 20–50 tahun). Oleh karena itu tindak konservasi penyu di lokasi penangkaran dimulai dari tukik hingga cukup kuat untuk dilepas ke laut. Sejumlah tukik yang ditinggalkan di stasiun penangkaran penyu untuk kebutuhan pengamatan, penelitian dan ekspose, sebaiknya selalu diperhatikan kebersihan air laut pada kolam (tukik, karantina, dan pembesaran) dan dilakukan upaya penanggulangan penyakit dan parasit yang biasa hinggap di penyu.

Upaya konservasi oleh Kelompok Masyarakat Konservasi Penyu untuk Wisata “Taman Ria” hendaknya tidak dimaknai konservasi sumberdaya dan perlindungan semata, namun secara seimbang melaksanakan upaya pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan terhadap sumberdaya penyu. Untuk itu, kegiatan pemantauan yang dilakukan meliputi: (1) Monitoring kepada setiap penyu yang mendarat di lokasi-lokasi peneluran yang berada pada wilayah pemantauannya, antara lain: jenis dan jumlah penyu yang mendarat, jumlah penyu yang bertelur, jumlah telur setiap penyu, dimensi telur penyu, panjang dan bobot, dan sebagainya. Hasil monitoring harus terdokumentasikan dan dicatat dalam form monitoring dan (2) Melakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan konservasi penyu secara berkesinambungan untuk bisa mengukur kecenderungan populasi penyu yang mendarat dan bertelur dan populasi penyu di penangkaran dari tahun ke tahun.

Pantai Taman merupakan KWU baru yang ditetapkan sebagai kawasan ekowisata. Keindahan alam sebagai modal utama atraksi wisata belum diimbangi dengan upaya menjaga kebersihan lingkungan dengan terlihatnya sampah yang berserakan. Pengelola ekowisata hendaknya menyediakan fasilitas tempah sampah di beberapa lokasi favorit ekowisatawan berada. Di samping itu, pengelola ekowisata juga bisa memberikan pengertian agar ekowisatawan juga bisa ikut menjaga kebersihan.

Pada masa-masa liburan di mana terlihat ekowisatawan banyak berkunjung ke lokasi, belum ada pengelolaan jumlahnya sesuai dengan daya dukung lingkungan ODTW. Beberapa fasilitas yang perlu diperbaiki adalah (1) Luas lahan parkir yang cukup dan jalan ke luar kawasan, (2) Jumlah gazebo untuk istirahat wisatawan ditambah, dan (3) Penataan lahan bagi usaha jasa makanan dan minuman. Di masing-masing tempat harusnya dilengkapi dengan papan interpretasi tentang konservasi penyu, ekologi hutan mangrove, papan himbauan, papan larangan, dan sebagainya. Ekowisatawan terlihat kurang interaksi dengan atraksi wisata karena ketiadaan pemandu.

KESIMPULAN

Berbagai kegiatan dilakukan dengan maksimal sebagai implementasi program pengabdian masyarakat yang difokuskan pada pengembangan kawasan ekowisata Pantai Taman Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan. Kegiatan tersebut antara lain, (1) konservasi penyu, (2) pembangunan kawasan pesisir, (3) penguatan konservasi penyu, (4) pembuatan kolam biota laut, (5) pembangunan *shelter* dan gazebo, (6) pembangunan infrastruktur ekowisata, (7) pembangunan ekowisata berbasis masyarakat, (8) pemberdayaan masyarakat ekowisata, (9) penguatan kawasan ekowisata, dan (10) revitalisasi kolam biota laut. Beberapa saran terkait pemberdayaan masyarakat berbasis ekowisata di kawasan konservasi penyu, yaitu (1) Secara kontinyu terus melakukan upaya penyadaran terhadap masyarakat tentang sadar wisata dan konservasi, khususnya penyu yang menjadi ikon Pantai Taman; (2) Pelaksanaan program harus terkoordinasi dan dilakukan secara *integrative*, melalui kelompok masyarakat konservasi penyu untuk wisata yang mandiri melalui program kewirausahaan produktif yang meliputi HO2 (hati, otak, dan otot) sampai pada rantai pemasaran berdasarkan kawasan pengembangan pariwisata yang ada; (3) Pemilihan program dan strategi pemberdayaan masyarakat berbasis ekowisata di kawasan konservasi penyu harus berdasarkan metodologi *survey* yang tepat, merupakan pengeloa-an usaha produktif yang tidak hanya berorientasi pada segmen pasar lokal, tetapi juga diarahkan pada perluasan segmen pasar baik di wilayah regional maupun nasional; (4) Pendampingan bukan dalam artian konvensional tetapi dalam artian modern, bersinergi dan terintegratif sampai pada

rantai pemasaran; dan (5) Adanya implementasi strategi pemasaran yang tepat berdasarkan perencanaan program pemasaran secara *bottom-up* dengan pembentukan tema-tema khusus atau *local brand image* KPP melalui pembentukan *focus group/cross function* tentang program pemberdayaan masyarakat pariwisata. Hal ini dilakukan agar paket wisata yang dihadirkan lebih variatif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian ipteks bagi Wilayah (IbW) yang difokuskan pada pengembangan kawasan ekowisata berbasis masyarakat di Pantai Taman Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan dapat terlaksana dengan maksimal berkat dukungan banyak pihak, antara lain DRPM Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), DPPM Universitas Muhammadiyah Malang dan DPPM Politeknik Negeri Malang, dan Pemerintah Kabupaten Pacitan serta masyarakat di sekitar Pantai Taman, Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan.

REFERENSI

- Arida, I. N. S. (2014). *Buku ajar pariwisata berkelanjutan*. Retrieved from https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/27853e1951c3f72a0e6e8a0be2a9ed30.pdf
- Erna, R., & Budiningtyas, S. (2013). Showroom batik di Kampong Batik Lawean: Respon masyarakat terhadap pengembangan pariwisata di kawasan cagar budaya. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 5(3), 168–179. <https://doi.org/10.22146/jnp.6690>
- Gasong, D. (2018). Analisis pendapatan masyarakat di lokasi wisata Ke'te' Kesu' Kabupaten Toraja Utara. *Prosiding Seminar Nasional 2018 Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, 1(April), 164–171. Retrieved from <https://jurnal.yapri.ac.id/index.php/semnassmipt/article/view/25>
- Khotimah, K., & Wilopo, W. (2017). Strategi pengembangan destinasi pariwisata budaya (Studi kasus pada kawasan Situs Trowulan sebagai Pariwisata Budaya Unggulan di Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 42(1), 56–65. Retrieved from <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1657>
- Lubis, H. S. (2006). *Perencanaan pengembangan ekowisata berbasis komunitas di kawasan wisata tengkahan kabupaten langkat Sumatera Utara* (Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara). Retrieved from <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/7147/037024034.pdf?sequence=1>
- Mudrikah, A., Sartika, D., Yuniarti, R., & Satia, A. B. (2014). Kontribusi sektor pariwisata terhadap GDP Indonesia tahun 2004 - 2009. *Economics Development Analysis Journal*, 3(2), 362–371. <https://doi.org/10.15294/edaj.v3i2.3844>
- Mujanah, S., Ratnawati, T., & Andayani, S. (2016). Strategi pengembangan desa wisata di kawasan hinterland Gunung Bromo Jawa Timur. *JHP17 Jurnal Hasil Penelitian LPPM Untag Surabaya Pebruari*, 1(1), 33–52. <https://doi.org/10.30996/jhp17.v1i01.578>
- Mulyana, Y., Huraerah, A., & Martiawan, R. (2019). Kebijakan pengembangan destinasi pariwisata Cianjur Selatan di Kabupaten Cianjur Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9(1), 490–511. <https://doi.org/10.15575/jispo.v9i1.5857>
- Mutaqin, A. Z. (2017). Pengembangan desa wisata dan pembangunan pariwisata berkelanjutan. *Wisatahalimun.Co.Id*. Retrieved from <https://wisatahalimun.co.id/pengembangan-desa-wisata>
- Prihanta, W., Syarifuddin, A., & Zainuri, A. M. (2017). Pembentukan kawasan ekonomi melalui pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. *Jurnal Dedikasi*, 14(1), 73–84. Retrieved from <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/dedikasi/article/viewFile/4304/4662>
- Purnama, R., & Apriliani, A. (2018). Pengentasan kemiskinan di Desa Talok melalui pendidikan non formal berbasis anyaman bambu dengan metode pembangunan berkelanjutan pasal 7 UU No. 13 Tahun 2011 menuju sustainable development goals (SDGs) di Indonesia 2045. *Lex Scientia Law Review*, 2(1), 31–46. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/download/23641/11024/>
- Rahajeng, M. S., & Manaf, A. (2015). Bentuk-bentuk kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya keberlanjutan program penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas (Studi kasus: Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan). *Jurnal Pengembangan Kota*, 3(2), 112–119. <https://doi.org/10.14710/jpk.3.2.112-119>
- Rizkianto, N., & Topowijono, T. (2018). Penerapan konsep community based tourism dalam pengelolaan daya tarik wisata berkelanjutan (Studi pada Desa Wisata Bangun, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 58(2), 20–26. Retrieved from <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2402>
- RPJMN. Rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) tahun 2015–2019: Agenda pembangunan Nasional. , Pub. L. No. 2/2015, Buku I: Agenda Pembangunan Nasional (2015).
- Saptari, A. (2000). Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. In *Manajemen pembangunan dan lingkungan* (pp. 1–54). Retrieved from <http://repository.ut.ac.id/4356/1/LING1004-M1.pdf>
- Sastrayuda, G. S. (2010). *Konsep pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata (Community based tourism)*. Retrieved

- from http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/LAINNYA/GUMELAR_S
- Setyorini, T. (2004). Kebijakan pariwisata dalam rangka meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat Kabupaten Semarang (Universitas Diponegoro). Retrieved from <http://eprints.undip.ac.id/14903/>
- Sujai, M. (2016). Strategi pemerintah Indonesia dalam menarik kunjungan turis mancanegara. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 20(1), 61–76. <https://doi.org/10.31685/KEK.V20I1.181>
- Sutjipto, H. (2014). Analisis pemberdayaan perekonomian masyarakat di kawasan ekonomi khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung. *Jurnal Administrasi Negara*, 3(Sept-Des 2014), 1–13. <https://doi.org/10.30656/sawala.v3i1.512>
- Suwena, I. K., & Widyatmaja, I. G. N. (2017). *Pengetahuan dasar ilmu pariwisata*. Retrieved from https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/3daa3fbf01385573f120b76e48df024a.pdf
- Trunajaya, I. G. (2016). *Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Kabupaten Badung*. Retrieved from <http://ejurnal.lppmunsera.org/index.php/Sawala/article/download/512/573>
- Waani, H. F. (2016). Sosial budaya dalam pengembangan pariwisata di Kelurahan Bunaken Kecamatan Bunaken Kota Manado. *Acta Diurna*, 5(2), 1–9. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/91057-ID-sosial-budaya-dalam-pengembangan-pariwis.pdf>